



PENGARUH KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ade Lilis¹⁾, I Ketut Patra²⁾, Ahmad Refki Saputra³⁾

1,2,3, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

1,2,3, lilisade48@gmail.com , ketutpatra@umpalopo.ac.id , ahmadrefkisaputra@umpalopo.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

23 Februari 2026

Direvisi

21 April 2026

Diterima:

25 April 2026

Tersedia daring:

07 Mei 2026

Kata Kunci:

Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Data Panel, Kemiskinan.

*Korespondensi:

Nama: Ade Lilis

E-mail:

lilisade48@gmail.com

Kantor Editorial

Politeknik Negeri Ambon

Pusat Penelitian dan

Pengabdian kepada

Masyarakat

Jl. Ir. M. Putuhena,

WailelaRumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Kode Pos: 97234

ABSTRAK

Pendahuluan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi antara tahun 2020 dan 2024.

Metode: Penelitian ini menggunakan teknik asosiatif dan bersifat kuantitatif. Data time series (2020-2024) dan data cross-sectional (24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan) digabungkan untuk membentuk data sekunder dalam bentuk data panel. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait.

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan model data panel melalui perangkat lunak IBM SPSS Statistics 2024.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel korupsi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap kemiskinan, yang berarti tingkat kemiskinan dapat dikurangi melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sedangkan inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa kenaikan inflasi cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan dengan kontribusi sebesar 6,9%, sedangkan 93,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian.

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi tantangan besar bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan meskipun tren pertumbuhan ekonomi regional yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya disertai dengan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan masyarakat, dan peluang kerja tetap menjadi faktor signifikan yang menghambat percepatan pengurangan kemiskinan. (Refki & Firmanzah, 2020) Masalah-masalah ini muncul akibat ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan terjadi ketika individu atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat stabilitas keuangan yang dianggap penting untuk standar kehidupan. Kemiskinan timbul dari keterbatasan yang dihadapi sebagian orang dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah fenomena sosial jangka panjang yang ditemukan di hampir semua negara dengan tingkat pembangunan yang bervariasi. Kemiskinan juga memiliki banyak dimensi, artinya masalah ini tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik (Derek, 2023).

Konsep siklus kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan dapat bertahan dalam jangka panjang akibat hubungan timbal balik antara keterbatasan modal, produktivitas rendah, dan investasi minimal. Kondisi ini mempersulit daerah atau masyarakat untuk keluar dari jebakan kemiskinan tanpa intervensi kebijakan yang efektif. Siklus kemiskinan dipandang sebagai cara bertahan hidup yang justru menjebak masyarakat (Turnbull et al., 2024). Dengan kata lain, siklus kemiskinan seperti lingkaran tanpa awal dan tanpa akhir, sehingga situasi terus berulang. Nurkse menjelaskan pandangannya tentang siklus kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya muncul dari kurangnya pembangunan di masa lalu, tetapi juga dari tantangan dalam pembangunan di masa depan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, elemen-elemen luar biasa semakin memperkuat siklus kemiskinan, dengan tingkat korupsi yang tinggi mengurangi efektivitas belanja anggaran pembangunan dan menghambat akumulasi modal publik. Inflasi yang melonjak mengurangi daya beli penduduk miskin dan menghambat investasi akibat ketidakpastian keuntungan. Pertumbuhan ekonomi, yang seharusnya menjadi pendorong pengentasan kemiskinan, tidak berjalan dengan baik dan tidak merata (Rahmah, 2023).

Jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki 24 kabupaten, tercatat sebesar 736.480 jiwa, atau 8,06 persen dari total penduduk. Kondisi penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2024, terlihat bahwa persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,64 persen dan secara absolut juga terjadi penurunan sebesar 52,4 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023, yang tercatat sebesar 8,70 persen atau 788,85 ribu jiwa (Serra Penutup Risantika, dkk. 2023).

Korupsi merupakan salah satu faktor institusional yang dapat menghambat efektivitas pembangunan ekonomi. Praktik ini menyebabkan alokasi anggaran publik menjadi suboptimal, sehingga manfaat pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam jangka panjang, korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memperlambat pengurangan kemiskinan. Hubungan antara korupsi dan kemiskinan sangat kompleks dan tersebar luas di sektor publik, dengan korupsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan dapat memicu korupsi karena melemahkan institusi ekonomi, politik, dan sosial (Pirvan & Nişulescu, 2022). Catatan kepolisian tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 149 kasus korupsi yang mencapai tingkat pengadilan, dan pada tahun 2024, 22.133 kasus terungkap dan 18.133 kasus diselesaikan, dengan penurunan 1.322 kasus kejahatan umum dan penurunan 128 dalam penyelesaian kasus. Disebutkan pula bahwa Komite Anti-Korupsi (ACC) Sulawesi Selatan merilis laporan anti-korupsi tahun 2024, mencatat 54 kasus korupsi yang tertunda di tingkat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Komite Anti-Korupsi (ACC) Sulawesi Selatan. 2024).

Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan karena mencerminkan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang tinggi tidak serta merta berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan jika hasil pembangunan tidak didistribusikan secara merata. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas pertumbuhan, bukan hanya besaran angka pertumbuhan. Meningkatnya tingkat kemiskinan dan masalah ekonomi dan sosial lainnya akan muncul jika negara tidak mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh serangkaian angka, dengan persentase tertinggi dan terendah terjadi pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 (Ningsih dkk., 2023). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 4,51% pada tahun 2023 dan 5,02% pada tahun 2024.

Inflasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi di Indonesia, khususnya kenaikan terus-menerus biaya barang dan jasa, yang disebut inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam suatu perekonomian. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, inflasi berdampak langsung pada daya beli karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk konsumsi dasar (Nasution, 2021). Tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2,81% pada tahun 2023 dan 1,23% pada tahun 2024 (Luthfi, MS. 2025).

Temuan penelitian Patra (2018) menyatakan bahwa korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan memiliki dampak langsung dan hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan di Indonesia. Iskandar dkk. (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, sebagaimana ditemukan oleh Fahrihan Fatza Arya Satriawan (2026), yang menyatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal itu tidak cukup untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melampaui garis kemiskinan. (Maryana Ningsih dkk. 2023) menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian inflasi, diketahui bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Teguh Epinda 2023), yang juga menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dipengaruhi oleh inflasi. Fokus utama setiap negara adalah inflasi sebagai salah satu indikator makroekonomi. Oleh

karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Kenaikan inflasi sering dianggap sebagai indikator peningkatan aktivitas ekonomi. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kemiskinan, hasil yang diperoleh

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten, namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Beberapa daerah seperti Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Luwu Utara umumnya menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (BPS, 2023). Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya (Muhammad dkk., 2024). Pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen memandang kemiskinan sebagai kurangnya kapasitas individu untuk hidup dengan bermartabat, sehingga kemiskinan dapat dinilai tidak hanya melalui pendapatan, tetapi juga melalui aspek non-ekonomi (Suresh 2023).

Sejumlah penelitian juga telah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sulawesi Selatan, menemukan bahwa beberapa variabel mempengaruhi kemiskinan, khususnya inflasi dan ketimpangan distribusi pendapatan, yang tetap menjadi masalah utama yang menghambat pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya harus mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan pembangunan antar daerah dan mengendalikan harga kebutuhan pokok (Harsono dkk., 2024).

Korupsi

Korupsi bertindak sebagai faktor yang menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan karena dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran dan menurunkan kualitas layanan publik. Korupsi dapat menghancurkan, menghambat, dan mengalihkan pertumbuhan ekonomi serta memperburuk kemiskinan. Korupsi berdampak negatif terhadap pemulihan dari kondisi keuangan yang sulit dan dalam memerangi kemiskinan. Korupsi merupakan penyimpangan dari nilai moral, integritas, dan tanggung jawab. Hubungan antara penguasa dan warga negara dalam korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau fungsi secara sembarangan dengan menggunakan cara-cara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok (Pirvan e Nişulescu 2022).

Menurut Hazmi (2023), semakin baik persepsi tingkat korupsi (semakin tinggi CPI), kemiskinan di Indonesia cenderung menurun. Gumala dan Anis (2019) menemukan bahwa korupsi memperburuk kemiskinan karena membuat pengelolaan anggaran menjadi tidak efisien. Sementara itu, Yolanda dan Satrianto (2019) menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga meningkatkan kemiskinan (Al Hazmi 2024).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator kemakmuran, karena mencerminkan peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Namun, di banyak negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berhasil mengurangi kemiskinan. Salah satu alasannya adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana peningkatan pendapatan nasional hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Teori trickle-down menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan jika manfaatnya mengalir ke kelompok berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi perkembangan suatu sistem ekonomi. Hal ini terjadi ketika ada peningkatan produksi barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi berhasil meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Aktivitas ekonomi mencakup pemanfaatan sumber daya produksi untuk menciptakan hasil yang kemudian memberikan penghargaan kepada sumber daya produksi yang dimiliki masyarakat (Kania Azzahra & Soebagyo 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan di luar Jawa menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, terutama ketika disertai dengan pengeluaran publik yang efektif di sektor pendidikan dan kesehatan. Studi ini memperkuat temuan Susanto dan Pangesti (2021), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, asalkan hasil pembangunan didistribusikan secara merata. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Siska T. Lembang¹, Josep B. Kalangi² (2023) menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi di satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dampak yang sedikit namun positif terhadap tingkat kemiskinan. Brajannoto dkk. (2021) menekankan pentingnya peningkatan peluang kerja agar pertumbuhan berdampak langsung pada rumah tangga miskin (Agussalim dkk. 2024).

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Di Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi sering menjadi tantangan serius bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan dan pesisir. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar menyebabkan penurunan signifikan daya beli penduduk miskin. Masyarakat miskin di wilayah ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga karena sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk konsumsi dasar. Teori ekonomi makro menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan jika tidak disertai dengan kebijakan pengendalian yang tepat.

Peneliti terdahulu telah menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, di mana lonjakan harga, terutama di sektor pangan, menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Fenomena ini juga tercermin di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengalami tekanan inflasi tinggi pasca pandemi. Sipahutar (2024) mendukung temuan ini dengan menjelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan (Handoyo, Erlando, e Septiyanto 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk menganalisis korelasi antara variabel pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kebutuhan untuk mengukur pengaruh variabel secara objektif menggunakan data panel dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2020-2024. Data diproses menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 2024. Populasi penelitian terdiri dari seluruh 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode sensus digunakan sebagai strategi pengambilan sampel dalam penelitian ini, dengan setiap anggota populasi berfungsi sebagai sampel penelitian. Data sekunder digunakan sebagai alat yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), atau inspektorat daerah untuk data kasus korupsi (variabel korupsi diukur berdasarkan jumlah kasus yang tercatat). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengunduh laporan tahunan dan publikasi dari situs web resmi lembaga-lembaga tersebut.

HASIL DAN ANALISIS

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.1.1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.75968158
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.077
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Data residual secara statistik tidak terdistribusi normal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi asym.sig.(two-tailed) sebesar $0,010 < 0,05$, yang ditentukan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov. Karena ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ($n = 120$), penyimpangan dianggap tidak signifikan, dan model regresi masih dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.1.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.427	1.455		5.103	.000		
	Korupsi	-.424	.374	-.101	-1.133	.260	.984	1.017
	Pertumbuhan ekonomi	-1.174E-5	.000	-.205	-2.317	.022	1.000	1.000
	Inflasi	.923	.452	.182	2.045	.043	.983	1.017

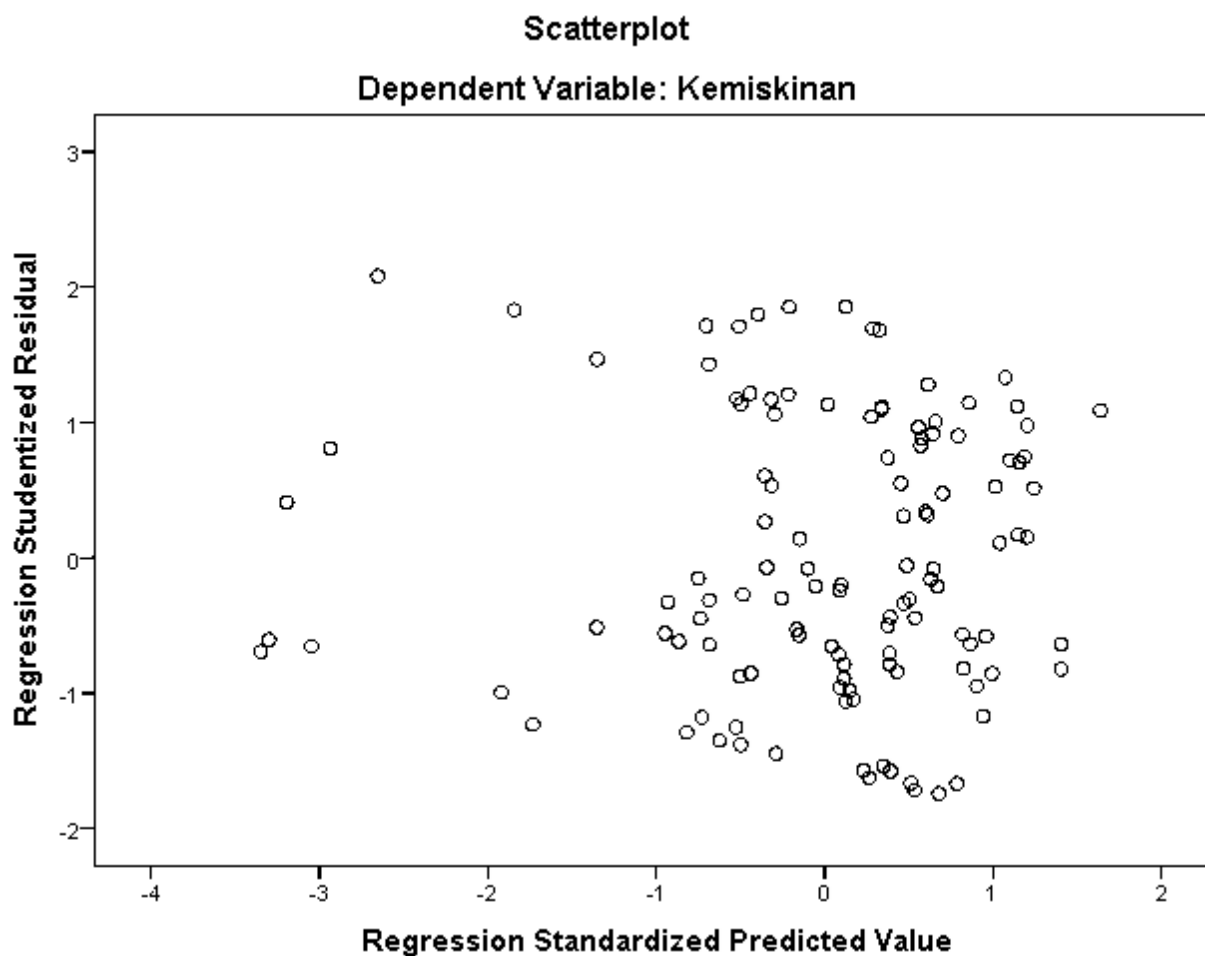
a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, nilai Tolerance untuk semua variabel independen (Korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan Inflasi) berada di atas 0,10, berkisar dari 0,983 hingga 1,000, dan nilai VIF semuanya di bawah 10, berkisar dari 1,000 hingga 1,017. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot, terlihat jelas bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol. Tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, berdasarkan pola titik-titik yang tersebar. Pada setiap nilai yang diharapkan, varians residual tetap konstan (homoskedastik). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.1.4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.304 ^a	.092	.069	2.795	1.662

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Korupsi

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,662. Jumlah variabel independen (k) = 3, jumlah sampel (n) = 120, dan nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (dL dan dU) pada tingkat signifikansi 5%. Nilai yang diperoleh adalah ($dL=1,601$) dan batas atas ($dU=1,736$) menurut tabel

Durbin-Watson. dU dan dL (1,601) dipisahkan oleh nilai DW sebesar 1,662, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.427	1.455		5.103	.000		
	Korupsi	-.424	.374	-.101	-1.133	.260	.984	1.017
	Pertumbuhan ekonomi	-1.174E-5	.000	-.205	-2.317	.022	1.000	1.000
	Inflasi	.923	.452	.182	2.045	.043	.983	1.017

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Berikut adalah temuan model persamaan regresi berdasarkan tabel di atas.

$$Y = 7,427 - 0,424X_1 - 1,174X_2 + 0,923X_3$$

a. Konstanta (7,427)

Nilai konstanta sebesar 7,427 menunjukkan bahwa jika korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dianggap tidak berubah, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan akan sebesar 7,427 satuan.

b. Variabel Korupsi (X1)

Korupsi memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan secara statistik, artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan selama periode penelitian.

c. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,174 berarti setiap peningkatan 1 satuan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -1,174. Menurut konsep ini, hubungan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Variabel Inflasi (X3)

Koefisien regresi inflasi sebesar 0,923 berarti tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,923 untuk setiap peningkatan satu satuan inflasi. Hubungan ini searah, di mana peningkatan inflasi dapat berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Analisis Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.2.2. Hasil Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.304 ^a	.092	.069	2.795	1.662

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Korupsi

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

Nilai R sebesar 0,304 dan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,069 diperoleh berdasarkan hasil uji model summary. Hal ini menunjukkan bahwa faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan korupsi secara bersama-sama dapat menjelaskan 6,9% dari variasi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,662 menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi yang serius dalam model.

Uji Parsial (t)

Berdasarkan Tabel 4.3.1.

a. Variabel Korupsi (X1)

Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh nilai t sebesar -1,133 dengan tingkat signifikansi $0,260 > 0,05$. Akibatnya, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, yang menunjukkan bahwa korupsi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Berdasarkan hasil uji-t, tingkat signifikansi adalah $0,022 < 0,05$ dan nilai t adalah -2,317. Akibatnya, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Variabel Inflasi (X3)

Berdasarkan hasil uji-t, nilai t adalah 2,045 dengan tingkat signifikansi $0,043 < 0,05$. Oleh karena itu, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Uji Simultan (F)

Tabel 4.2.3. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91.966	3	30.655	3.924	.010 ^b
	Residual	906.285	116	7.813		
	Total	998.251	119			
a. Dependent Variable: Kemiskinan						
b. Predictors: (Constant), Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Korupsi						

Sumber: Output Dari IBM SPSS Statistics 2024 (diolah oleh peneliti, 2025)

$$F = MS_{reg} / MS_{res} = 30,655 / 7,813 = 3,924$$

Nilai F yang dihitung adalah 3,924 dengan nilai signifikansi 0,010 ($< 0,05$) yang diperoleh dari hasil uji F. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan secara signifikan dipengaruhi oleh faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan korupsi secara simultan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,069, yang menunjukkan bahwa variabel independen (korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi) dan variabel dependen (kemiskinan) menjelaskan 6,9% dari variasi, dengan variabel di luar lingkup penelitian ini berkontribusi sebesar 93,1% sisanya. Berdasarkan hasil uji-t, variabel korupsi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai t sebesar -1,133 dan tingkat signifikansi 0,260. Dengan nilai t sebesar -2,317 dan tingkat signifikansi 0,022, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Ini berarti tingkat kemiskinan di suatu daerah akan berkurang seiring meningkatnya pertumbuhannya. Terdapat pengaruh dari variabel inflasi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t sebesar 2,045 dan tingkat signifikansi 0,043, yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena

itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki pengaruh nyata terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, sementara korupsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam periode penelitian ini.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif, karena hal-hal tersebut terbukti memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun variabel korupsi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik, upaya pemberantasan korupsi tetap perlu diperkuat agar penggunaan anggaran pembangunan lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan pada stabilisasi harga kebutuhan pokok agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap tingkat kemiskinan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). Jalur menuju pengurangan kemiskinan: Bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal mempengaruhi kemiskinan melalui ketimpangan di Indonesia. *Economics*, 12(12), 1–17. <https://doi.org/10.3390/economics12120316>
- Al Hazmi, R. A. (2024). Peran moderasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara korupsi dan kemiskinan di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 76–86. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.725>
- Komite Anti Korupsi (ACC) Sulawesi. (2024). Tindak pidana korupsi dan kerugian kasus korupsi di Sulawesi Selatan (Laporan Februari).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023 (No. 47). <https://www.bps.go.id>
- Committee, E. (2025). Corruption as a barrier to poverty reduction and development: A cross-country panel analysis. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19325.83681>
- Derek, T. M., dkk. (2023). Pengaruh pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(9), 49–60.
- Epinda, T., & Sinaga, I. S. N. (2023). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura 2011–2021. *ABDIMAS SEAN*, 1(2), 73–79. <https://doi.org/10.58471/abdimascean.v1i02.149>
- Fahrihan Fatza Arya Satriawan, & Aisyah, S. (2026). Analisis kualitas pembangunan manusia dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(4). <https://doi.org/10.17509/ijdb.v5i4.97045>
- Gai, A. M. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep., 8(2), 3862–3882 .
- Handoyo, R. D., Erlando, A., & Septiyanto, I. (2020). Dampak faktor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *EcceS*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13382>
- Harsono, I., Hatim, F., Sumastuti, E., Thalib, B., & Sya'rani, R. (2024). Statistik kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indeks pembangunan manusia dan PDRB menggunakan data panel. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 13(4), 234–239.
- Iskandar, I., Abrar, M., & Sufirmansyah, S. (2022). Pengaruh IPM, inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(1). <https://doi.org/10.22373/jep.v13i1.761>
- Kania Azzahra, A., Akalili Ayu, A., & Soebagyo, D. (2024). Analisis determinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000–2021. *Action Research Literate*, 8(3), 340–345. <https://doi.org/10.46799/arl.v8i3.279>
- Ketut Patra, I., & Junaidi, N. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>
- Lembang, S. T., Kalangi, J. B., & Lopian, A. L. C. P. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(8), 73–84.
- Luthfi, M. S. (2025). Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan 2024.
- Maryana Ningsih, N., Nursini, N., & Sabir, S. (2023). Pengaruh upah minimum, inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362–372.
- Muhammad, F., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Hubungan ketimpangan gender dan tingkat kemiskinan di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 22(1), 51–59.
- Muna, M., & Anwar, K. (2023). Pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia., 2(2), 83–95.
- Nasution, R. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia, inflasi, dan BI rate terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 167–186.
- Pirvan, C., & Nişulescu, I. (2022). Kemiskinan dan ketimpangan sebagai prediktor korupsi. *CECCAR Business Review*, 3(4), 66–72. <https://doi.org/10.37945/cbr.2022.04.08>

- Rahmah, N. A. (2023). Program Studi Ekonomi Syariah.
- Refki, A. S., Hapid, Jusman, & Firmanzah, A. (2024). Pengaruh pendapatan keluarga, lingkungan hidup dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Palopo. In Proceedings of the International Economics and Business Conference (IECON) (Vol. 2, No. 2, pp. 928–935). <https://jurnal.amertainstitute.com/index.php/IECON/article/view/164>
- Serra Pungkas Riantika, S., Triany, N. H., & Hasma, M. M. (2023). Data informasi kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2023.
- Suresh, J. (2023). Kemiskinan adalah kurangnya kapabilitas: Tinjauan literatur. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 7, 462–476. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Turnbull, B., Gordon, S. F., Ojeda-García, A., Fuentes-Balderrama, J., & Cruz del Castillo, C. (2024). Jebakan kemiskinan: Teori grounded tentang harga kelangsungan hidup bagi penduduk miskin perkotaan di Meksiko. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03328-3>